

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Daerah Kota Kupang sudah berjalan, akan tetapi belum diimplementasikan sepenuhnya dalam hal ini proses pengelolaan modul kas dan modul pembukuan masih ada beberapa item yang belum dilakukan karena kesenjangan yang sering terjadi antara lain, pengelolaannya belum dijalankan secara maksimal, baik dari segi infrastruktur, Keterlambatan pemrosesan data serta gangguan sistem yang sering terjadi maupun dari segi Sumber Daya Manusianya.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah : (1) Sumber daya manusia yang belum memadai; (2) Perangkat dan jaringan internet yang masih minim; (3) Pemahaman Admin terhadap keuangan daerah belum terimplemetasikan sepenuhnya; (4) Minimnya sosialisasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke pimpinan-pimpinan daerah dan ke SKPD-SKPD.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Kupang maka saran yang diberikan penulis adalah :

1. Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan permasalahan dalam Modul-Modul yaitu (1) Modul Kas terdiri-dari : proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban, Surat Tanda Setoran (STS), Buku Kas Umum (BKU), Kartu Kendali Belanja Tak Langsung, dan Kartu Kendali Kegiatan. (2) pada modul pembukuan terdiri-dari : Proses Pembuatan Jurnal Korolari, Proses Pembuatan Jurnal Memorial, Proses Pembuatan Buku Besar Pendapatan, Proses Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran, Proses Pembuatan Neraca, serta Proses Pembuatan Laporan Arus Kas.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya antara lain, Sumber daya manusia yang belum memadai; Perangkat dan jaringan internet yang masih minim; Minimnya sosialisasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke pimpinan-pimpinan daerah dan ke SKPD-SKPD. Oleh karena itu, sangat diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk memperhatikan sistem pengelolaan dan ketersediaan sumber daya manusia demi menunjangnya proses dalam mengelola keuangan daerah kedepan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, 1990 *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE
- Halim, Abdul. 1994 *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: YBPFE
- Halim, Abdul. 2000 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kota Kupang Dalam Angka Tahun 2011*
- Mardiasmo. 2004 *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Mursyidi, 2009 *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Surat Edaran Mendagri Nomor 900/122/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD
- Surat Edaran Mendagri Nomor 900.806. BAKD, SE.900.360. BAKD tentang Implementasi SIPKD

Sutabri, Tata. 2004 *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi

Sutabri, Tata 2005 *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.

Widjajanto, Nugroho, 2001 *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.